

KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN TERKAIT KERJA SAMA PERTUKARAN INFORMASI MILITER PADA TAHUN 2016

South Korea's Foreign Policy Related To Military Information Exchange Cooperation In 2016

Phillia Tafwida Herdanezza

*Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Jember, Indonesia
170910101048@mail.unej.ac.id*

Agus Trihartono

*Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Jember, Indonesia
atrihartono@unej.ac.id*

Honest Dody Molasy

*Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Jember, Indonesia
honestdody.fisip@unej.ac.id*

INFO ARTIKEL

Article History

Received

27 October 2022

Revised

26 June 2023

Accepted

14 July 2023

Keyword:

GSOMIA; Park Geun-Hye; South Korea.

Kata Kunci:

GSOMIA; Park Geun-Hye; Korea Selatan.

Abstract

This study aims to analyze President Park's decision in formulating the GSOMIA (General Security of Military Agreement) cooperation. It is carried out using descriptive qualitative methods and secondary data collection techniques from literature studies and relies on the Decision-Making Process theory of Richard C. Snyder which looks at the subjective factors of the main decision makers. This study shows that for the first time, South Korea and Japan managed to reach an agreement on military information exchange cooperation (GSOMIA) in 2016. After being delayed for four years, President Park Geun-Hye insisted on realizing GSOMIA in the midst of a crisis due to public rejection. It was found through policy analysis related to the formulation of GSOMIA from the South Korean point of view that President Park's perspective was shaped by several factors. Factors originating from internal South Korea are President Park's desire to increase South Korea's military capabilities. Meanwhile, the external factor that became the reason for the realization of GSOMIA was President Park's desire to protect the country from threats.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan Presiden Park dalam merumuskan kerja sama GSOMIA (General Security of Military Agreement). Dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data sekunder dari studi pustaka, serta bersandar pada teori Decision-Making Process dari Richard C. Snyder yang melihat faktor subyektif pengambil keputusan utama. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya, Korea Selatan dan Jepang berhasil mencapai kesepakatan dalam kerja sama pertukaran Informasi militer (GSOMIA) pada 2016. Setelah sempat tertunda selama empat tahun, Presiden Park Geun-Hye bersikeras untuk merealisasikan GSOMIA di tengah krisis akibat penolakan publik. Melalui analisis kebijakan berkaitan dengan perumusan GSOMIA dari sudut pandang Korea Selatan ditemukan bahwa perspektif Presiden Park dibentuk oleh beberapa faktor. Faktor yang berasal dari internal Korea Selatan berupa keinginan Presiden Park untuk meningkatkan kapabilitas militer Korea Selatan. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi alasan realisasi GSOMIA adalah keinginan Presiden Park melindungi negara dari ancaman.

PENDAHULUAN

Negara senantiasa bertindak untuk mencapai hasil yang maksimal dengan berkaca pada sistem internasional di lingkup eksternal dan pengaruh domestik di lingkup internal. Tindakan negara selalu diasosiasikan dengan perilaku aktor-aktor utama yang berbicara atas nama negara dan mempunyai wewenang dalam pengambilan kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan, persepsi mereka, terutama persepsi pemimpin negara, memegang kendali paling kuat dalam memengaruhi arah perumusan kebijakan negara. Pemimpin negara merupakan pemegang kendali *de jure* suatu negara yang merepresentasi rakyat dan negara itu sendiri.

Proses pembuatan kebijakan luar negeri menjadi menarik dalam memahami pilihan dua negara yang saling bermusuhan dan tidak saling percaya untuk kemudian bekerja sama, seperti Korea Selatan dan Jepang. Meskipun saling bertetangga dekat, kedua negara memiliki sejarah hubungan yang kelam akibat isu sejarah. Batu penghambat berupa isu sejarah tersebut sering menjadi penghalang bagi hubungan Korea Selatan dan Jepang selama bertahun-tahun. Meskipun telah beberapa kali berganti era, pemimpin kedua negara masih belum dapat menemui titik terang. Trauma sejarah

yang melekat erat di dalam darah masyarakat Korea Selatan belum cukup untuk membentuk persepsi positif bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, sulit bagi kedua negara untuk mencapai kesepakatan, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan.

Sejak normalisasi tahun 1965, Korea Selatan dan Jepang untuk pertama kalinya sampai pada kesepakatan untuk menandatangani sebuah kerja sama berdimensi militer yang bernama GSOMIA atau *General Security of Military Agreement*. GSOMIA diartikan sebagai sebuah kerja sama dalam pertukaran informasi militer oleh dua negara atau lebih. Upaya panjang dalam mencapai kesepakatan ini pernah dilakukan, namun selalu kandas karena publik Korea Selatan selalu menentang GSOMIA. Pada tahun 2012, publik Korea Selatan menolak adanya kerja sama dengan Jepang, terutama berkaitan dengan militer. Presiden Korea Selatan waktu itu, Lee Myung-Bak (2008-2012), lebih mempertimbangkan suara penolakan publik ini sehingga Kerja sama GSOMIA terpaksa batal dilanjutkan pada tahun 2012 (Mulyaman, 2018, p. 180; Pieroni, 2022, pp. 17-18)..

Berbeda dengan pemimpin sebelumnya, pada tahun 2016, Presiden Park Geun-Hye justru bersikeras menghidupkan

kembali GSOMIA. Presiden Park merealisasikan kerja sama militer dengan Jepang di tengah oposisi publik (David & Jiun, 2017, pp. 93-94; Kang, 2021, p. 42). Yang menarik, realisasi tersebut juga diputuskan tanpa melalui diskusi dengan Majelis Nasional Korea Selatan (David & Jiun, 2017, pp. 95-97). Keputusan tersebut tidak sejalan dengan fakta bahwa Korea Selatan merupakan negara demokratis (Haggard & You, 2014, p. 168; Hwang, Cho, & Wiegand, 2018, p. 699). Dalam hal ini Pemerintah Korea Selatan telah membuat sebuah keputusan strategis yang mengabaikan suara penolakan mayoritas masyarakat (Hassig, 2013, pp. 21-22; Gracellia, 2019, p. 49). Dalam perumusan kerja sama GSOMIA dengan Jepang, suara publik terabaikan.

Dalam sejarah kedua negara, perjanjian GSOMIA merupakan sebuah kerja sama militer pertama yang disepakati secara bilateral oleh Korea Selatan dan Jepang. Sebelum GSOMIA, tidak pernah ada perjanjian militer yang khusus melibatkan Korea Selatan dan Jepang saja (Hinata-Yamaguchi, 2016, pp. 384-385; Tamaki, 2020, p. 5). Kerja sama antara keduanya selalu menggandeng Amerika Serikat (AS) sebagai penengah (Kim, 2020, p. 30; Koga,

2023, p. 67). Dengan demikian, kerja sama GSOMIA merupakan pintu baru dalam hubungan militer kedua negara.

Nota kerja sama GSOMIA terlampir di dalam Buku Putih Pertahanan (*Defense White Paper*) yang dikeluarkan oleh Korea Selatan. Dalam nota tersebut, GSOMIA memiliki pengertian sebagai perjanjian antar dua negara untuk saling bertukar informasi militer (*Ministry of National Defense Republic of Korea*, 2016, p. 255). Nota perjanjian GSOMIA memastikan perlindungan terhadap pengelolaan informasi yang saling dibagikan (*Ministry of National Defense Republic of Korea*, 2016, pp. 256-257). Dengan ditandatanganinya kerja sama GSOMIA, kedua negara bebas berbagi kapabilitas informasi militer tanpa perantara pihak ketiga.

Nota kerja sama GSOMIA juga melingkupi pertukaran informasi terkait nuklir Korea Utara. Korea Selatan dan Jepang diperbolehkan untuk berbagi informasi dari sensor pelacak nuklir milik masing-masing negara (*Ministry of National Defense Republic of Korea*, 2016, pp. 256-257). Kerja sama GSOMIA merupakan rencana kedua negara untuk meningkatkan strategi *deterrence* dan memperkuat pertahanan (Wiegand, 2015, pp. 351-353).

Korea Selatan memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mendapat informasi intelijen (Seo, 2021, p. 2; Koga, 2014, p. 62). Sedangkan Jepang berkemampuan unggul dalam mengumpulkan informasi melalui teknologi satelit luar angkasa dan kapal selam (Zhao, 2019). Keduanya diharapkan saling bertukar keunggulan kapabilitas masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Kementerian Pertahanan Korea Selatan.

Tujuan utama GSOMIA adalah untuk berbagi informasi dan analisis yang teliti mengenai rudal balistik dan kapal selam Korea Utara (Aoki, 2021, pp. 3-4; Oba & Lee, 2020, pp. 123-124). Dengan adanya informasi dari dua arah, Korea Selatan dan Jepang mendapat peluang untuk mencegah ancaman misil dan nuklir Korea Utara secara lebih efektif.

Sebelumnya, Korea Selatan dan Jepang sebenarnya telah menandatangani *Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea*¹. Pakta tersebut merupakan simbol dimulainya hubungan baru pasca kolonialisme Jepang di Korea Selatan semasa Perang Dunia II (T. R. Yoon, 2008, pp. 189-194; Koo & Choi, 2022, p.

290). Pakta normalisasi tersebut juga belum mampu membuka jalan bagi adanya kerja sama damai antara kedua negara (Sakaki, 2012, pp. 204-205; Kan, 2012, pp. 105-106). Salah satu pemicu yang menyebabkan rapuhnya hubungan adalah faktor sejarah yang belum terselesaikan sepenuhnya (Kuki, 2013, pp. 246-247; Magbadelo, 2006, pp. 76-79). Oleh karena itu, sering kali dinamika relasi kedua negara ini disebut sebagai tetangga dekat yang berjauhan.

Faktor sejarah kedua negara tersebut lah yang menyebabkan proses pengambilan keputusan terkait kerja sama GSOMIA baik pada tahun 2012 maupun 2016 menghadapi rintangan serupa. Menurut *survey* tahun 2012, sebesar 61 persen warga Korea Selatan tidak menyetujui adanya kerja sama GSOMIA (Jiyeon et al., 2012; Taylor, 2012, p. 94). Oleh karena itu, GSOMIA terpaksa tidak dilanjutkan pada Era Presiden Lee Myung-Bak (2008-20012) (Nakato, 2020, p. 323; Park, 2016, pp. 129-131). Namun, di tahun 2016, Korea Selatan justru mengambil *output* kebijakan yang berbeda.

Pada November 2016, Korea Selatan kembali mempertimbangkan kelanjutan kerja sama GSOMIA. *Survey* dilakukan oleh

¹ *Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea* merupakan perjanjian penyelesaian sehubungan dengan klaim yang timbul akibat aneksasi Jepang atas Korea dari tahun 1910 hingga 1945. Berdasarkan perjanjian tersebut, Korea menerima bantuan dana sebesar 800 juta US dolar dari Jepang sebagai penyelesaian penuh atas masalah berkaitan dengan klaim dan properti.

lembaga *polling* bernama *Gallup Korea Research Institute* menunjukkan sebanyak 59 persen warga Korea Selatan masih tetap menolak kerja sama GSOMIA dengan Jepang (*Gallup Korea Research Institute*, 2016; Nam, 2017, pp. 407-408). Namun, Presiden Park Geun-Hye justru memutuskan untuk mengabaikan opini publik itu dan melanjutkan realisasi GSOMIA (Mobrand, 2018, p. 4). Presiden Park Geun-Hye memilih untuk tidak mendengar tentangan dari masyarakat. Langkah ini sangat berbeda dengan *output* kebijakan di era Presiden sebelumnya, yakni Presiden Lee Myung-Bak.

Sikap Presiden Park Geun-Hye dalam merealisasikan kerja sama GSOMIA menjadi pembahasan menarik. Terdapat beberapa alasan yang memengaruhi urgensi Presiden Park Geun-Hye dalam menghadapi kerja sama GSOMIA di tahun 2016. Melalui Teori *Decision-Making Process* dari Snyder, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis hanya pada keputusan subjektif Presiden Park Geun-Hye. Karena Presiden Park Geun-Hye merupakan pembuat keputusan utama di Korea Selatan pada tahun 2016.

Penelitian ini berargumen bahwa keputusan subjektif Presiden Park Geun-Hye didorong oleh persepsinya terhadap beberapa

faktor internal dan juga eksternal Korea Selatan. Berkaitan dengan faktor internal, kerja sama GSOMIA dilakukan karena Presiden Park Geun-Hye melihat pentingnya penguatan kapabilitas militer Korea Selatan. Selain itu, Presiden Park Geun-Hye juga berusaha mengangkat isu persatuan dan perdamaian melalui kerja sama dengan Jepang tersebut.

Tidak hanya alasan domestik, Kerja sama GSOMIA turut dipengaruhi oleh faktor eksternal. Menggunakan analisis dari Snyder (1962). Tulisan ini menunjukkan bahwa Presiden Park Geun-Hye menjadikan kerja sama GSOMIA sebagai alat pertahanan Korea Selatan dari semakin menguatnya ancaman Korea Utara. Akibat ancaman itu, Presiden Park Geun-Hye juga menginginkan adanya penguatan strategi geopolitik Korea Selatan melalui kerja sama GSOMIA.

Hasil telusuran atas penelitian terdahulu, studi yang berkaitan dengan hubungan bilateral di bidang keamanan antara Korea Selatan dan Jepang, khususnya GSOMIA, masih jarang ditemukan. Beberapa studi terdahulu telah membahas mengenai kekuatan eksternal yang dapat mendorong terbentuknya GSOMIA. Pertama adalah kehadiran AS yang dinilai dapat menumbuhkan kestabilan hubungan militer

bagi Korea Selatan dan Jepang (Klingner, 2012). Selain itu, kebangkitan Tiongkok dan peningkatan teknologi rudal Korea Utara juga mendorong Korea Selatan untuk melakukan kerja sama keamanan dengan Jepang (Asaoka, 2016). Studi lainnya lebih berfokus pada pengaruh domestik Korea Selatan dalam perumusan GSOMIA. Beberapa diantaranya membahas mengenai isu *comfort women*, penolakan masyarakat Korea Selatan terhadap GSOMIA, dan konflik sejarah antara kedua negara (Ku, 2019; Lalitya, 2020; Ward & Lay, 2016).

Berbeda dengan studi sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus kepada perspektif pengambil kebijakan dalam realisasi GSOMIA antara Korea Selatan dan Jepang. Studi ini membahas latar belakang dirumuskannya GSOMIA dari dua perspektif sekaligus, yakni faktor domestik atau internal, maupun faktor eksternal. Selain itu, penelitian ini memberikan tinjauan lebih mendalam terkait pertimbangan serta indikator apa saja yang turut memengaruhi keputusan pengambil kebijakan.

Penelitian ini juga dapat memberikan *insight* baru dan referensi dalam analisis pengambilan kebijakan luar negeri. Tulisan ini menggunakan kerangka teori *Decision-Making Process* untuk lebih meninjau

pemikiran subjektif dari Presiden Park Geun-Hye.

TEORI *DECISION-MAKING PROCESS*

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis persepsi Presiden Park Geun-Hye adalah teori proses pembuatan keputusan (*Decision-Making Process Theory*) oleh Richard C. Snyder dan rekan (1962). Pembuatan keputusan pada dasarnya merupakan sebuah proses yang meliputi berbagai pertimbangan (Zaidi, 2021, p. 43). Mekanisme pengambilan keputusan milik Snyder dan rekan menunjukkan pertimbangan terbentuknya aksi dan reaksi negara dalam politik internasional.

Ide utama Teori *Decision-Making Process* oleh Snyder dan rekan yaitu negara merupakan unit pembuat kebijakan utama. Analisis kebijakan luar negeri yang dianjurkan Snyder berfokus pada perilaku para pemegang wewenang *de jure* ketika membuat keputusan. Pemimpin negara merupakan aktor yang bertindak dan berbicara atas nama negara (Mas'ood, 1989; Al-Najjar & Husien, 2022, p. 195). Oleh karena itu, aktor pengambil keputusan menempati posisi yang strategis sebagai pihak yang memengaruhi kebijakan sebuah negara.

Snyder dan rekan menetapkan dua faktor utama yang memengaruhi proses pengambilan keputusan suatu negara. Kedua faktor tersebut yakni faktor subjektif dan sumber-sumber potensial (Snyder et al., 1962 pp. 55-65; S. Lee, 2020, p. 11). Faktor subjektif memiliki pengertian bahwa kalkulasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan persepsi aktor dalam mendefinisikan situasi (Snyder et al., 1962, p. 58; Milani & Pinheiro, 2016, p. 280). Karena dalam situasi apapun, berdasarkan teori ini, definisi situasi merupakan definisi menurut persepsi aktor utama.

Singkatnya, interpretasi kondisi yang dialami oleh aktor utama merupakan kunci sebuah keputusan. Persepsi aktor menentukan hasil dari proses pengambilan keputusan yang diambil olehnya (Snyder et al., 1962 p. 58; Açikalin, 2021, p. 2). Aktor utama akan menghubungkan dirinya dengan situasi di sekitar mereka. Keputusan negara akan sesuai seperti apa yang dipandang oleh aktor tersebut (Mas'oed, 1989; Dawson, 2022, p. 358). Lebih singkatnya, Snyder dan rekan menekankan pada pentingnya pandangan subjektif aktor utama pembuat keputusan, bukan pada realitas pemikiran rasional yang objektif.

Selain faktor subjektif, faktor-faktor potensial turut berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Faktor potensial merupakan variable-variabel yang menjadi pertimbangan aktor pengambil keputusan (Snyder et al., 1962 pp. 60-65; Erdiatulha et al., 2020, p. 6). Khususnya dalam menentukan sebuah arah kebijakan luar negeri. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut dikenal sebagai *setting*. *Setting* tersebut dipilah menjadi dua bagian, antara lain yakni faktor internal dan faktor eksternal (Snyder et al., 1962, p. 64; Hudson, 2005, p. 3).

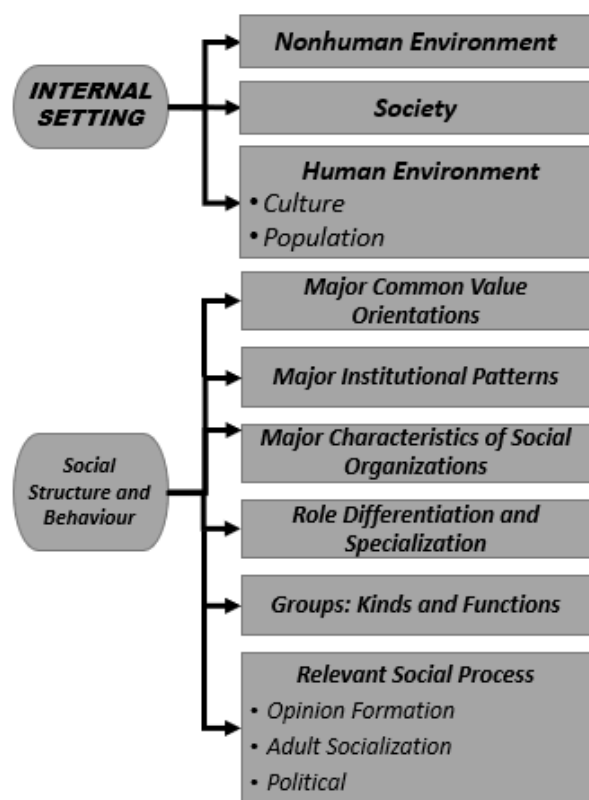
Faktor-faktor internal dan eksternal mempunyai kedudukan yang sama dan saling memengaruhi dalam proses pembuatan keputusan luar negeri. Menurut Snyder dan rekan, faktor-faktor internal sangat dipengaruhi oleh hubungan masyarakat dengan negara. Selain itu, terdapat pula struktur sosial dalam suatu negara yang turut memengaruhi kebijakan luar negeri.

Untuk keperluan analisis, tidak semua indikator dalam faktor internal dan faktor eksternal harus digunakan menjadi tumpuan (Mas'oed, 1989). Artinya, seorang analis diberikan kebebasan untuk memilih faktor-faktor utama yang paling relevan dan

signifikan dalam mengkaji proses pembuatan kebijakan politik di suatu negara.

Pada Gambar 1 di bawah ini ditunjukkan indikator-indikator yang masuk ke dalam *internal setting of decision making*:

Gambar 1. Indikator-indikator di dalam *Internal Setting of Decision-Making Process* oleh Richard C. Snyder



Sumber: (Snyder et al., 1962, p. 64)

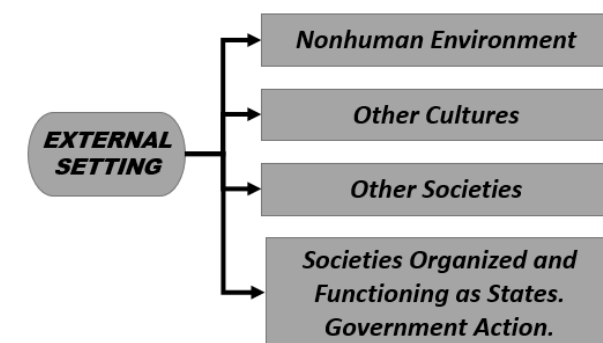
Sembilan indikator dalam *internal setting* antara lain adalah *nonhuman environment, society, culture, population, major common value orientations, major institutional patterns, major characteristics of social organizations, role differentiation*

ans specialization, groups: kinds and fuctions, dan relevant social process.

Penelitian ini melihat bahwa dari kesembilan indikator dalam *internal setting* di atas, terdapat tiga indikator yang sesuai dengan pembahasan. Ketiga indikator yang relevan dalam kebijakan Korea Selatan dalam merespons kesepakatan kerja sama militer dengan Jepang adalah faktor *non human environment, society, dan major common value orientation*.

Sedangkan pertimbangan yang lain yaitu faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi kondisi yang ada di luar wilayah teritorial negara. Pada Gambar 2 di bawah ini ditunjukkan bahwa faktor eksternal terdiri atas beberapa indikator, antara lain: *non-human environment, other culture, other Societies, dan societies organized and functioning as states* (Snyder et al., 1962 p. 64).

Gambar 2 Indikator-indikator di dalam *External Setting of Decision-Making Process* oleh Richard C. Snyder



Sumber: (Snyder et al., 1962, p. 64)

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah ini, dari keempat indikator *external setting* di atas, penelitian ini melihat bahwa indikator yang memengaruhi keputusan Korea Selatan adalah *non-human environment* dan *societies organized and functioning as states*.

Penentuan indikator dalam *internal setting* dan *external setting*, merujuk pada pernyataan-pernyataan dan sikap Presiden Park Geun-Hye sebagai pembuat keputusan utama di Korea Selatan. Berdasarkan pertimbangan keadaan internal dan eksternal, Presiden Park Geun-Hye berusaha merumuskan kebijakan luar negeri dengan menyeimbangkan faktor-faktor yang ada. Faktor-faktor tersebut kemudian membentuk persepsi dan mendorong Presiden Park Geun-Hye untuk melakukan kerja sama militer dengan Jepang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ilmiah ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif dipilih yaitu untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Metode ini

bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi pada objek penelitian seperti perilaku, motivasi dan tindakan. Sedangkan data yang diolah dalam metode ini yang paling utama adalah data berupa dokumen resmi maupun pernyataan resmi kenegaraan, seperti pidato dan hasil wawancara Presiden Park Geun-Hye.

Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau studi pustaka melalui pengumpulan sumber data sekunder. Data yang diolah didapat dari berbagai macam sumber, seperti buku, artikel, jurnal, surat kabar *online*, situs web dan sumber-sumber lainnya yang menyediakan informasi terkait. Data sekunder yang terkumpul dari berbagai literatur kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat dan disusun menjadi sebuah tulisan dalam pembahasan.

Proses di atas bertujuan untuk mempermudah pengelompokan data yang didapat agar sesuai kebutuhan. Pengelompokan data sekunder yang telah diperoleh bertujuan agar data tersebut lebih mudah dibaca, dipahami, dan diambil pula informasi yang diperlukan. Proses selanjutnya merupakan penyusunan data. Data-data yang telah dikelompokkan

kemudian dihubungkan sesuai dengan pola-pola di dalam kerangka teori.

HASIL DAN DISKUSI

Mengenyampingkan Masa Lalu Untuk Meraih Keamanan Masa Depan

Mengikuti teori *Decision-Making Process* oleh Richard C. Snyder, pilihan kebijakan luar negeri suatu negara dianalisis dari adanya pengaruh faktor internal dan eksternal. Dua faktor tersebut menjadi pertimbangan Presiden Park Geun-Hye dalam memutuskan realisasi kerja sama GSOMIA dengan Jepang. Terlepas dari adanya penolakan publik terhadap kerja sama tersebut, analisis pembahas difokuskan pada pandangan subjektif Park Geun-Hye. Alasannya adalah pada tahun 2016, Park Geun-Hye menjabat sebagai Presiden Korea Selatan sekaligus pembuat keputusan utama di Korea Selatan.

Faktor Internal

Sebagai faktor internal, terdapat tiga faktor yang mendapat hirauan, yaitu: *Nonhuman Environment*, *Major Common Value* dan *Society*.

Nonhuman Environment: Peningkatan Kapabilitas Militer Korea Selatan

Faktor internal pertama yang memengaruhi keputusan Korea Selatan untuk bergabung dalam perjanjian GSOMIA dengan Jepang berkaitan dengan faktor *nonhuman environment*. *Nonhuman environment* merupakan faktor yang tidak terkait dengan pola hidup atau perilaku manusia. Faktor tersebut dapat berupa letak geografis negara, tingkat ekonomi suatu negara, strategi dan tingkat keamanan suatu negara, atau lain sebagainya.

Sejak awal menjabat, Presiden Park Geun-Hye kerap mengingatkan warga Korea Selatan akan perlunya persiapan kuat dalam menangkal kemungkinan provokasi Korea Utara. Dalam satu kesempatan di acara Tahun Baru 2014, Presiden Park Geun-Hye menegaskan akan pentingnya kapabilitas militer Korea Selatan. Secara singkat Presiden Park Geun-Hye menegaskan, “*in preparation for a possible North Korean provocation, we will strengthen our security posture and crisis management system*” [Dalam persiapan untuk kemungkinan provokasi Korea Utara, kami akan memperkuat postur keamanan dan sistem manajemen krisis] (*Ministry of Public Administration and Security, 2013a*). Menurut Presiden Park Geun-Hye dalam pidato tersebut, formasi keamanan dan sistem manajemen krisis Korea Selatan harus

lebih diperkuat mengingat sikap Korea Utara yang sulit untuk bisa ditebak.

Menurutnya, Korea Selatan perlu untuk membenahi postur pertahanan militer di tengah tingginya potensi ancaman. Presiden Park Geun-Hye menegaskan pentingnya sebuah postur pertahanan terbaik. Dalam perayaan *67th Armed Forces Day*, Presiden Park Geun-Hye menegaskan: *"I ask for your unwavering trust and support so that our military can always have the best defense posture"* [Saya meminta kepercayaan dan dukungan kuat rakyat agar militer kita selalu dapat memiliki postur pertahanan yang terbaik] (*Ministry of Public Administration and Security*, 2015). Dalam pidato tersebut, Presiden Park Geun-Hye menekankan agar warga Korea Selatan turut mendukung upaya penting negara. Khususnya perihal menciptakan postur pertahanan Korea Selatan yang kuat. Presiden Park Geun-Hye menambahkan bahwa dirinya tidak akan menyia-nyiakan segala usaha untuk memberikan dukungan.

Setahun kemudian dalam perayaan *68th Armed Forces Day*, Park Geun-Hye berjanji untuk menjadikan militer Korea Selatan sebagai benteng pertahanan utama negara. Pernyataan tersebut ia ungkapkan dalam pidato pada 30 September 2016.

Pernyataan Park Geun-Hye, adalah sebagai berikut: *"I will spare no effort with the people to provide all support so that our military can fulfill its role as a bastion of national defense"* [Saya tidak akan menyia-nyiakan upaya rakyat untuk memberikan semua dukungan agar militer kita dapat memenuhi perannya sebagai benteng pertahanan negara] (*Ministry of Public Administration and Security*, 2016e).

Presiden Park Geun-Hye percaya bahwa keamanan nasional Korea Selatan tidak dapat dijamin kecuali pemerintah dan militer saling bekerja sama. Sebagai seorang pemimpin, Presiden Park Geun-Hye membuat sebuah janji untuk menempatkan keamanan Korea Selatan di atas segala kepentingan lainnya. *"I will surely protect the Republic of Korea and our people as if it were my life, no matter what criticisms come upon me"* [Saya pasti akan melindungi Republik Korea dan rakyat kami seolah-olah itu adalah hidup saya, tidak peduli kritik apa yang datang kepada saya] (*Ministry of Public Administration and Security*, 2016e). Bahkan, Ia menegaskan tidak akan menghiraukan kritik yang ditujukan kepadanya dan fokus untuk memperkuat pertahanan Korea Selatan dari berbagai ancaman.

Presiden Park Geun-Hye lebih lanjut mengungkapkan rencana untuk meningkatkan kemampuan militer Korea Selatan. Menurutnya, menjalin aliansi dengan komunitas internasional merupakan langkah paling strategis untuk menjaga Korea Selatan dan warganya dari segala ancaman. Pidato yang disampaikan berisikan:

“The government will continue to strengthen sanctions and pressure on North Korea while working more closely with the international community to protect the country and its people from North Korea's nuclear weapons and missiles” [Pemerintah akan terus memperkuat sanksi dan tekanan terhadap Korea Utara sambil bekerja lebih erat dengan komunitas internasional untuk melindungi negara dan rakyatnya dari senjata nuklir dan rudal Korea Utara] (Ministry of Public Administration and Security, 2016e).

Dalam pidatonya tersebut, Presiden Park Geun-Hye menilai aliansi merupakan strategi penting bagi Korea Selatan untuk membantu meningkatkan pertahanan dan keamanan negara. Terutama di tengah meningkatnya ancaman kemampuan militer negara tetangga mereka, yakni Korea Utara.

Pernyataan-pernyataan di atas memperkuat indikasi keputusan Presiden Park Geun-Hye untuk beraliansi dengan Jepang di bawah pakta GSOMIA. Strategi kunci yang ingin dicapai Presiden Park Geun-Hye terkait kapabilitas militer Korea Selatan adalah: *“it is most important to build a strong security posture that is not shaken by North Korean threats and provocations”* [yang paling penting adalah membangun postur keamanan yang kuat yang tidak tergoyahkan oleh ancaman dan provokasi Korea Utara] (Ministry of Public Administration and Security, 2016e). Bagi Presiden Park Geun-Hye, Korea Selatan harus memenuhi kemampuan militer yang besar dalam menghadapi segala macam ancaman. Aliansi yang dilakukan oleh Korea Selatan bersama dapat komunitas internasional merupakan strategi Korea Selatan untuk memperkuat pertahanan negara.

Major Common Value: Nilai Perdamaian di dalam Masyarakat Korea Selatan

Aspek lainnya adalah *major common value orientation* atau orientasi nilai umum yang utama. Aspek ini adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat suatu negara termasuk para pembuat keputusan. Orientasi nilai tersebut dapat memengaruhi kebijakan

atau keputusan yang diambil. Masyarakat Korea Selatan menganut orientasi nilai yang percaya pada hubungan yang harmonis, kerja sama, konsensus, dan solidaritas sosial (J.-Y. Kim, 2014, p. 34; J. W. Lee, 2014, p. 9). Orientasi nilai tersebut juga dianut oleh para pembuat keputusan luar negeri Korea Selatan. Termasuk Presiden Park Geun-Hye.

Melalui orientasi nilai tersebut, Presiden Park Geun-Hye kerap menekankan kebijakan luar negeri yang nasionalis. Ia ingin membuat Korea Selatan menjadi negara terbuka yang dapat dipercaya, dihormati, dan dicintai dalam mata internasional. Presiden Park Geun-Hye menyinggung hal tersebut dalam pidatonya, yakni

"To ease tensions and conflicts and further spread peace and cooperation in Asia, I will work to strengthen trust with countries in the region including the United States, China, Japan, Russia and other Asian and Oceania countries" [Untuk meredakan ketegangan dan konflik serta lebih menyebarkan perdamaian dan kerja sama di Asia, saya akan bekerja untuk memperkuat kepercayaan dengan negara-negara di kawasan ini termasuk AS, Tiongkok, Jepang, Rusia, dan negara-negara Asia dan Oseania

lainnya] (*Ministry of Public Administration and Security*, 2013b).

Melalui pidato yang disampaikan Presiden Park Geun-Hye pada hari pelantikan sebagai Presiden, orientasi nilai dirinya dapat terlihat dengan jelas. Orientasi nilai tersebut turut memengaruhi *decision makers* dalam pembuatan keputusan. Presiden Park Geun-Hye memegang teguh nilai perdamaian dan kerja sama yang tertanam dalam dirinya sebagai bagian dari masyarakat Korea Selatan. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi tujuan dan dasar baginya untuk memperkuat hubungan dengan negara lain.

Berkaitan dengan kerja sama GSOMIA dengan Jepang, Presiden Park Geun-Hye mengatakan, *"Japan is an important neighbor who will open up peace and prosperity in Northeast Asia together"* [Jepang adalah tetangga penting yang akan membuka perdamaian dan kemakmuran di Asia Timur Laut bersama-sama] (Blue House, 2013).

Sejak awal, Presiden Park Geun-Hye menekankan pentingnya nilai perdamaian dan kebersamaan dalam bekerja sama dengan Jepang. Presiden Park Geun-Hye tampaknya percaya bahwa Jepang juga memegang erat nilai tersebut dan berkeinginan untuk mencapai kemakmuran bersama.

Keinginan Presiden Park Geun-Hye untuk membangun hubungan kerja sama dengan Jepang sangat jelas disampaikan dalam pidato perayaan *70th Liberation Day*. Berikut isi pidato Presiden Park Geun-Hye:

I expressed my will to move toward a future of new cooperation and co-prosperity. This is because close friendly cooperation between Korea and Japan is very important for peace and prosperity not only between the two countries but also in East Asia. [Saya menyatakan keinginan saya untuk bergerak menuju masa depan kerja sama baru dan kemakmuran bersama. Hal ini karena kerja sama persahabatan yang erat antara Korea dan Jepang sangat penting untuk perdamaian dan kemakmuran tidak hanya antara kedua negara tetapi juga di Asia Timur.] (*Blue House*, 2015).

Dalam pidato di atas, Presiden Park Geun-Hye mengharapkan adanya kerja sama baru dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang. Jepang dipandang merupakan negara tetangga yang memiliki nilai orientasi perdamaian dan kemakmuran (Korostelina, 2017, p. 4; Phillips, Lee, & Yi, 2020, p. 7). Jepang dilihat sebagai negara penting bagi Korea Selatan untuk menciptakan kerja sama

menuju arah yang selaras.

Oleh karena itu, wajar bagi Presiden Park Geun-Hye untuk merealisasikan kerja sama GSOMIA dengan Jepang. Meskipun permasalahan historis masih menjadi "duri dalam daging," namun Presiden Park Geun-Hye percaya pada nilai dan orientasi dasar kedua negara. Baginya, kerja sama dan perdamaian merupakan kunci bagi terbentuknya hubungan baru Korea Selatan dan Jepang. Presiden Park Geun-Hye mengharapkan bahwa dengan memegang nilai tersebut, kedua negara dapat berjalan berdampingan dan lebih fokus untuk menciptakan perdamaian bersama.

Society: Persatuan untuk Memperkuat Postur Keamanan

Faktor selanjutnya yang menjadi pertimbangan Presiden Park Geun-Hye adalah *society* atau masyarakat. *Society* merupakan faktor yang membahas kondisi atau gambaran kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Faktor ini lebih khusus menganalisis tingkat partisipasi atau kritisme masyarakat terhadap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah.

Presiden Park Geun-Hye mengalami tekanan besar dalam perumusan kerja sama GSOMIA pada tahun 2016. Meskipun masih terjadi penolakan oleh

publik, akan tetapi Presiden Park Geun-Hye tetap memilih opsi untuk melanjutkan kerja sama GSOMIA. Bagi Presiden Park Geun-Hye tampaknya pertimbangan keamanan nasional, seharusnya cukup untuk membuat masyarakat Korea Selatan menyatukan suara mereka (Haggard & You, 2014, p. 177; Doucette, Koo, & Doucette, 2015, p. 18). Nilai yang dianut oleh masyarakat Korea Selatan tersebutlah yang kerap dipegang teguh oleh Park Geun-Hye dalam merumuskan kebijakan.

Presiden Park Geun-Hye dalam perayaan *National Unification Convention* 2016, menyampaikan

“The people should unite with one mind to build an unshaken security readiness posture and prepare for the future of the nation by focusing on building the foundation for unification with a long-term vision and patience” [Rakyat harus bersatu padu untuk membangun postur kesiapan keamanan yang tak tergoyahkan dan mempersiapkan masa depan bangsa dengan fokus membangun landasan persatuan dengan visi dan kesabaran jangka panjang] (Ministry of Public Administration and Security, 2016a).

Dalam pidato yang diungkap Presiden Park Geun-Hye di atas, masyarakat Korea Selatan seharusnya saling menyatukan pemikiran untuk mencegah ancaman kedaulatan. Menurutnya, hanya dengan persatuan, tujuan negara untuk membentuk kesiapan postur keamanan dapat tercapai.

Pentingnya persatuan warga Korea Selatan kembali Presiden Park Geun-Hye tekankan dalam pidatonya. Pada perayaan ulang tahun *Armed Forces of the Republic of Korea* pada 30 September 2016, ia mengungkapkan, *“If the military is at the forefront of security and deters North Korea's provocations and threats, then all of our people should become a strong supporter of the military”* [Jika militer berada di garis depan keamanan dan menghalangi provokasi dan ancaman Korea Utara, maka semua rakyat kita harus menjadi pendukung kuat militer] (Ministry of Public Administration and Security, 2016e). Menurutnya, warga Korea Selatan secara keseluruhan harus menjadi pendukung bagi pemerintah untuk menciptakan militer yang kuat. Terutama berkaitan dengan ancaman keamanan yang berasal dari provokasi Korea Utara.

Lebih lanjut dalam pidatonya, Presiden Park Geun-Hye juga menginginkan warga Korea Selatan untuk turut mendukung upaya

pemerintah Korea Selatan. Keinginan atas dukungan publik itu terlihat jelas dalam pidato berikut “*National security cannot be guaranteed unless the government and the people's military make concerted efforts*” [Keamanan nasional tidak dapat dijamin kecuali pemerintah dan militer rakyat melakukan upaya bersama] (Ministry of Public Administration and Security, 2016e). Presiden Park Geun-Hye menginginkan agar warga Korea Selatan turut mendukung strategi dan usaha yang telah direncanakan pemerintah. Menurutnya, keamanan nasional hanya akan bisa tercapai apabila pemerintah dan warga Korea Selatan bekerja sama dalam usaha yang selaras. Meskipun muncul ketidak-setujuan, wajar bagi Presiden Park Geun-Hye untuk tetap melanjutkan kerja sama GSOMIA. Kerja sama merupakan sebuah strategi untuk menguatkan militer Korea Selatan. Oleh karena itu, dengan berlandaskan rasa kesatuan, warga Korea Selatan harus turut mendukung upaya yang telah dilakukan pemerintah.

Faktor Eksternal

Sebagai faktor eksternal, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu: *Nonhuman Environment*, *Societies Organized as State Action*.

Nonhuman Environment: Ancaman Geografis Korea Selatan

Faktor eksternal pertama yang memengaruhi keputusan Korea Selatan untuk bergabung dalam perjanjian GSOMIA dengan Jepang berkaitan dengan faktor *nonhuman environment*. *Nonhuman environment* merupakan faktor selain manusia yang berasal dari luar batas wilayah suatu negara dan dapat memengaruhi pembuat kebijakan. Faktor yang terkait dapat berupa letak geografis, kondisi ekonomi negara lain dan sebagainya.

Serangkaian aksi provokatif Korea Utara di awal tahun 2016, membuat Presiden Park Geun-Hye bersikap semakin waspada. Dengan berkaca pada aktivitas nuklir Korea Utara yang semakin tidak terkontrol, Presiden Park Geun-Hye secara resmi mengumumkan dalam *parliamentary speech on state affairs* pada 15 Februari 2016, bahwa “*We can no longer be dragged around by North Korea's deceptions and threats*” [Kita tidak bisa lagi diseret oleh penipuan dan ancaman Korea Utara] (Ministry of Public Administration and Security, 2016d).

Presiden Park Geun-Hye menekankan pemerintahannya memilih untuk bersikap keras dalam menghadapi Korea Utara. Dirinya yakin bahwa Korea Selatan tidak akan tinggal diam lagi dalam merespons

aktivitas nuklir Korea Utara. Tindakan Korea Utara yang terus memprovokasi negara lain, menempatkan Korea Selatan dalam kegelisahan tersendiri.

Pada kesempatan di tanggal 29 Februari 2016, Presiden Park Geun-Hye menegaskan posisi Korea Selatan dalam menghadapi Korea Utara. Ia menyampaikan, *“the government will make sure that North Korea gives up its nuclear weapons based on a stronger security posture and international cooperation”* [pemerintah akan memastikan bahwa Korea Utara menyerahkan senjata nuklirnya berdasarkan postur keamanan yang kuat dan kerja sama internasional] (Ministry of Public Administration and Security, 2016c). Dengan pertimbangan keamanan nasional yang dihadapi oleh negaranya, Presiden Park Geun-Hye secara tegas menetapkan tidak akan membuka pintu dialog dengan Korea Utara. Presiden Park Geun-Hye akan berfokus untuk membangun sistem pertahanan nasional yang lebih stabil.

Pernyataan Presiden Park Geun-Hye dikuatkan kembali oleh Han Min-Koo sebagai menteri Pertahanan Korea Selatan. Ia menjelaskan mengenai pentingnya penambahan kapasitas informasi intelijen militer bagi Korea Selatan. Terhadap khalayak pada 27 Oktober 2016, Ha Min-

Koo menjelaskan bahwa:

We faced a grave security situation this year in which North Korea tested two nuclear devices and fired more than 20 rockets, including submarine-launched ballistic missiles.... If we can obtain military information on Pyongyang's nuclear and missile programmes directly from Japan, it will greatly strengthen our ability to counter the North's provocations. [Kami menghadapi situasi keamanan yang parah tahun ini di saat Korea Utara menguji dua perangkat nuklir dan menembakkan lebih dari 20 roket, termasuk rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam.... Jika kita dapat memperoleh informasi militer tentang program nuklir dan rudal Pyongyang langsung dari Jepang, hal tersebut akan sangat memperkuat kemampuan kita untuk melawan provokasi Korea Utara.] (Harris, 2016)

Pernyataan Han Min-Koo didasari atas percobaan tes nuklir Korea Utara. Korea Utara juga melakukan lebih dari dua puluh peluncuran misil, termasuk peluncuran misil balistik bawah laut (*Submarine-Launched Ballistic Missile*) (Harris, 2016). Han Min-

Koo turut mengkhawatirkan peluncuran roket 300-mm (*Multiple Rocket Launcher*) (Harris, 2016). Sementara roket tersebut diperkirakan dapat mencapai jarak hingga Provinsi *Chungcheong (Cheongnam)*, Korea Selatan (Harris, 2016). Rangkaian peristiwa ini mengharuskan Menteri Pertahanan Korea Selatan untuk meningkatkan kekuatan militernya dengan penambahan kapasitas informasi intelijen.

Dalam perspektif Presiden Park Geun-Hye, Korea Selatan perlu menggandeng Jepang sebagai partner pertukaran informasi militer untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. S. H. Park (2017) dan J. Kim, (2020) menilai bahwa Jepang merupakan sekutu berharga bagi Korea Selatan dalam menghadapi Korea Utara. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Presiden Park Geun-Hye. Secara tegas ia mengungkapkan dalam pidato pelantikan bahwa, *"To ease tensions and conflicts.., I will work to strengthen trust with countries in the region including the United States, China, Japan"* [Untuk meredakan ketegangan dan konflik.., saya akan bekerja untuk memperkuat kepercayaan dengan negara-negara di kawasan termasuk AS, Tiongkok, Jepang] (*Ministry of Public Administration and Security*, 2013b).

Sebuah hal yang wajar apabila pada akhirnya Presiden Park Geun-Hye memutuskan untuk melakukan aliansi dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Keputusan Presiden Park Geun-Hye untuk merealisasikan kerja sama GSOMIA dengan Jepang adalah bentuk konsistensinya dalam memutuskan suatu kebijakan (Darussalam, 2020, p. 259). Keputusan Presiden Park Geun-Hye menunjukkan pengakuannya terhadap pentingnya menangkal segala bentuk ancaman (Michishita, 2014, p. 30). Terlepas dari ketegangan di antara Korea Selatan dan Jepang, musuh sebenarnya adalah tetaplah Korea Utara.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Park Geun-Hye pada 71ST *Liberation Day Celebration* pada tanggal 15 Agustus 2016, yang menyatakan bahwa,

"The government will do everything necessary and possible while further strengthening cooperation with the international community to protect the safety of the country and its people from North Korea's nuclear weapons and missiles" [Pemerintah akan melakukan segala yang diperlukan dan mungkin sambil terus memperkuat kerja sama dengan masyarakat internasional untuk melindungi

keselamatan negara dan rakyatnya dari senjata nuklir dan rudal Korea Utara] (Ministry of Public Administration and Security, 2016b).

Kebijakan luar negeri yang diambil oleh Presiden Park Geun-Hye sebagai seorang pemimpin Korea Selatan, selalu berkiblat pada keamanan rakyat serta negaranya. Kondisi geografis dan kapabilitas militer Korea Utara dianggap Presiden Park Geun-Hye sebagai isu yang memerlukan tindakan tegas. Dengan demikian, keputusan bergabung dalam GSOMIA merupakan sikap Presiden Park Geun-Hye untuk melindungi kedaulatan negara Korea Selatan.

Societies Organized as State Action: Strategi Hubungan Trilateral (AS-Jepang-Korea Selatan)

Faktor eksternal selanjutnya yang memengaruhi keputusan Korea Selatan adalah faktor *Societies organized and functioning as states; Government action*. Faktor ini merupakan faktor yang diartikan sebagai masyarakat terorganisir dan berfungsi sebagai negara. Selain itu, faktor ini juga melingkupi tindakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam memengaruhi arah dan pertimbangan negara untuk merumuskan suatu kebijakan.

Jepang dan Korea Selatan mencapai kesepakatan penting yang menyelesaikan masalah *comfort women* pada 2015. Usaha kedua negara untuk mencapai akhir dari *comfort women* telah membuka pintu kerja sama (Kumagai, 2016, p. 66; Szalontai, 2018, p. 168). Presiden Park Geun-Hye sendiri membenarkan fakta tersebut dalam suatu rapat parlemen Korea Selatan pada 15 Februari 2016. Ia menyatakan bahwa:

At the end of last year, for the first time in 24 years, there was an agreement between Korea and Japan on the issue of comfort women victims in the Japanese military. I hope that we can open a new chapter in the Korea-Japan relationship by holding hands while facing history. [Akhir tahun lalu, untuk pertama kalinya dalam 24 tahun, terjadi kesepakatan antara Korea dan Jepang tentang isu wanita penghibur korban kekerasan tentara militer Jepang. Saya berharap kita dapat membuka babak baru dalam hubungan Korea-Jepang dengan berpegangan tangan sambil menghadapi sejarah.] (Ministry of Public Administration and Security, 2016d)

Dengan terselesaikannya isu sejarah antara Korea Selatan dan Jepang, Presiden

Park Geun-Hye memberikan harapan besar agar kedua negara dapat membuka lembar baru dalam hubungan diplomatik. Berdasarkan jurnal Lee (2014), Park Geun-Hye kerap menginginkan agar Korea Selatan dan Jepang dengan berproses menangani isu kolonialisasi.

Menanggapi uji coba nuklir keempat Korea Utara pada 6 Januari 2016, Pemerintah Korea Selatan dan Jepang merevitalisasi pentingnya kerja sama trilateral AS-Korea Selatan-Jepang, Presiden Park Geun-Hye melalui Sekretaris Kepresidenan Korea Selatan memberikan penegasan bahwa,

“The two leaders (South Korea and Japan) reaffirmed the importance of the full implementation of the comfort women agreement by the Japanese military in December of last year and agreed to work towards it” [Kedua pemimpin (Korea Selatan dan Jepang) menegaskan kembali pentingnya implementasi penuh dari perjanjian wanita penghibur oleh militer Jepang pada bulan Desember tahun lalu dan setuju untuk bekerja ke arah tersebut] (Blue House, 2016).

Dalam pidato yang telah disebutkan sebelumnya, sekretaris Korea Selatan mengungkapkan bahwa Korea Selatan dan Jepang telah sepakat untuk memperkokoh

hubungan keamanan sebagai implementasi kerja sama trilateral. Selain itu, Korea Selatan dan Jepang juga beralasan bahwa penyelesaian isu *comfort women* memerlukan implementasi penuh. Ancaman nuklir dari Korea Utara merupakan sebuah kesempatan bagi kedua negara (Aini & Kurniawan, 2021, pp. 263-264; Panda, 2015, p. 150). Keduanya perlu menunjukkan nyata ambisi mereka untuk membangun kembali hubungan bilateral, terutama dalam bidang keamanan.

Terselesaikannya isu *comfort women* membentuk peluang kondusif bagi hubungan Korea Selatan dan Jepang. Pasca mencapai kesepakatan isu *comfort women*, Presiden Park Geun-Hye ingin menghidupkan kembali kerja sama dengan Jepang. Presiden Park Geun-Hye melihat hubungan trilateral antara Korea Selatan, Jepang, dan AS sebagai sebuah jalan untuk mengkoordinasi kekuatan. Hal tersebut sesuai dengan tulisan Gluck dan rekan dalam jurnal Tow (2015) terkait hubungan Korea Selatan dan Jepang. Kedua negara bersama dengan AS berpandangan untuk saling menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan.

Dalam pertemuan puncak trilateral pada 21 Maret 2016, ketiganya menegaskan bahwa *"Ketiganya perlu untuk bergerak lebih maju dari sebelumnya melalui*

peningkatan kerja sama di bidang keamanan” (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2016). Melalui pernyataan tersebut, Presiden Park Geun-Hye bersama kedua pemimpin lainnya memiliki harapan besar agar kerja sama trilateral ini dapat berkontribusi lebih. Penguatan kerja sama trilateral tidak hanya sebagai strategi utama untuk menanggulangi ancaman nuklir Korea Utara, akan tetapi juga untuk memperkuat komunikasi negara sekutu AS. (Santoro & Warden, 2015, pp. 148-150; Cho & Shin, 2017, p. 8).

Melihat sikap antusiasme terhadap kerja sama trilateral, wajar bagi Presiden Park Geun-Hye untuk merealisasikan rencana GSOMIA dengan Jepang. Terlebih setelah Korea Selatan berhasil menyingkirkan batu hambatan berupa isu *comfort women* dengan Jepang (Ward & Lay, 2016, pp. 256-257; Ku, 2019, p. 107). Hal tersebut semata-mata dilakukan oleh Presiden Park Geun-Hye untuk menguatkan strategi kerja sama trilateral bersama AS.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan subjektif Presiden Park Geun-Hye sangat memengaruhi arah kebijakan Korea Selatan. Terutama dalam merumuskan kebijakan

realisasi kerja sama GSOMIA dengan Jepang. Analisis Teori *Decision-Making Process* oleh Snyder menunjukkan bahwa keputusan Presiden Park Geun-Hye dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal Korea Selatan.

Faktor internal yang mendorong keputusan tersebut adalah Presiden Park Geun-Hye menilai bahwa perlu adanya peningkatan kapabilitas militer Korea Selatan dengan tetap memegang nilai perdamaian dan persatuan. Sementara itu, faktor eksternal adalah meningkatnya ancaman pengembangan nuklir Korea Utara. Sehingga, Korea Selatan perlu memperbaiki dan meningkatkan strategi pertahanan dengan negara sekutu mereka.

Terlepas dari penolakan publik, Korea Selatan dan Jepang telah berhasil merealisasikan kerja sama GSOMIA. Pakta GSOMIA yang ditandatangani pada tahun 2016 secara resmi mengakhiri kebekuan hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang. Kerja sama GSOMIA menjadi kerja sama bilateral pertama di bidang militer selama 50 tahun pasca normalisasi hubungan kedua negara. Kesepakatan tersebut juga merupakan sebuah kesepakatan penting yang membuka citra baik antara Korea Selatan dan Jepang di mata internasional. Tindakan

pemerintah Korea Selatan dan Jepang untuk merealisasikan kerja sama GSOMIA adalah sebuah langkah awal untuk bersama-sama melupakan sejarah yang kelam dan bergerak maju untuk meningkatkan kerja sama guna mencapai kepentingan yang lebih besar.

REFERENSI

- Açikalin, Ş. N. (2021). A New and Alternative Leadership Model To Analyze the Role of Leaders in Foreign Policy. *Janus.Net*, 12(2), 1–17. <https://doi.org/10.26619/1647-7251.12.2.1>
- Aini, R. Q., & Kurniawan, Y. (2021). Quasi-Alliance at Play: The Curious Case of South Korea's Aborted Withdrawal from GSOMIA in 2019. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(3), 253–267. <https://doi.org/10.22146/JSP.59148>
- Al-Najjar, S. A. A., & Husien, S. K. (2022). Richard Snyder's Approach for Analyzing Decision-Making Process in Foreign Policy. *Journal of Political and Security Studies*, 5(2), 189–217. <https://doi.org/https://doi.org/10.31271/jopss.10069>
- Aoki, N. (2021). Takeaways From a Time of Increased Friction: South Korea-Japan Security Cooperation from 2015 to Present. *Korea Economic Institute of America*, 1–10. Retrieved from https://keia.org/wp-content/uploads/2021/09/KEI_APS_2021_Aoki.pdf
- Asaoka, M. (2016). *Korean Perception on Defense Cooperation with Japan*. Georgetown University.
- Blue House. (2013). *68th Liberation Day Congratulatory Address*. Retrieved from http://18president.pa.go.kr/news/speech.php?srh%5Bsrh_gb%5D=key&srh%5Bsearch_type%5D=3&srh%5Bsearch_value%5D=%C0M%BB&srh%5Bpage%5D=4&srh%5Bview_mode%5D=detail&srh%5Bseq%5D=39
- Blue House. (2015). *70th Liberation Day Congratulatory Address*. Retrieved from http://18president.pa.go.kr/news/speech.php?srh%5Bsrh_gb%5D=key&srh%5Bsearch_type%5D=3&srh%5Bsearch_value%5D=%C0M%BB&srh%5Bpage%5D=2&srh%5Bview_mode%5D=detail&srh%5Bseq%5D=11762
- Blue House. (2016). *Reaffirming the importance of full implementation of the comfort women agreement through the Korea-Japan summit*. Retrieved from http://18president.pa.go.kr/news/overseasTrip/2016/trip2016.php?srh%5Bsmmt_view_mode%5D=detail&srh%5Bsmmt_seq%5D=35&srh%5Btab_no%5D=e&srh%5Bpage%5D=3&srh%5Bview_mode%5D=detail&srh%5Bseq%5D=14853
- Cho, E. J. R., & Shin, K. young. (2017). South Korean views on Japan's constitutional reform under the Abe government. <https://doi.org/10.1080/09512748.20>

- 17.1397731, 31(2), 256–266.
<https://doi.org/10.1080/09512748.2017.1397731>
- Cossa, R. A. (2012, July 23). Japan-South Korea Relations: Time to Open Both Eyes. Retrieved December 13, 2020, from Council on Foreign Relations website:
<https://www.cfr.org/report/japan-south-korea-relations-time-open-both-eyes>
- Darussalam, M. F. (2020). The Influence of Domestic Politics of South Korea on its Relations with North Korea and The United States. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23(3), 250–261.
<https://doi.org/10.22146/jsp.48652>
- David, K., & Jiun, B. (2017). Japan-Korea Relations: What Goes Up, Must Come Down. *A Triannual E-Journal on East Asia Bilateral Relations*, Vol. 18(No. 3), 91–101.
<https://doi.org/10.1136/bmj.39566.494907.94>
- Dawson, G. (2022). “No future for Libya with Gaddafi”: Classical realism, status and revenge in the UK intervention in Libya. *Cambridge Review of International Affairs*, 35(3), 357–374.
<https://doi.org/10.1080/09557571.2021.1888879>
- Doucette, J., Koo, S., & Doucette, J. (2015). *Pursuing Post-democratisation: The Resilience of Politics by Public Security in Contemporary South Korea*
- Pursuing Post-democratisation: The Resilience of Politics by Public Security in Contemporary South Korea*. 46(2), 198–221.
<https://doi.org/10.1080/00472336.2015.1094119>
- Erdiatulha, Karjaya, L. P., & Rizki, K. (2020). Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Tun Mahathir terhadap Investasi Megaproyek Tiongkok di Malaysia. *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, 2(December), 1–16.
- Gallup Korea Research Institute. (2016, November 17). Korea-Japan Military Cooperation. Retrieved July 18, 2022, from Gallup Korea Research Institute: Daily Opinion No. 236 website:
<http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=789>
- Gracellia, J. (2019). Implikasi Penanganan Masalah Comfort Women terhadap Hubungan Jepang dan Korea Selatan pada Tahun 2015-2019. *VERITY Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 11(21), 43–55.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/verity.v11i21.2451>
- Haggard, S., & You, J. S. (2014). Freedom of Expression in South Korea. *Http://Dx.Doi.Org/10.1080/00472336.2014.947310*, 45(1), 167–179.
<https://doi.org/10.1080/00472336.2014.947310>
- Harris, B. (2016, November 23). South Korea and Japan Sign Pact to Counter North Korea Threat. Retrieved September 12, 2022, from Financial Times website:

- <https://www.ft.com/content/88d9a392-b119-11e6-a37c-f4a01f1b0fa1>
- Hassig, K. O. (2013). *Korea's Chances in the 21 st Century: The Story Continues*. Virginia: The Institute for Defense Analyses.
- Hinata-Yamaguchi, R. (2016). Completing The U.S.-Japan-Korea Alliance Triangle: Prospects and Issues in Japan-Korea Security Cooperation. *Korean Journal of Defense Analysis*, 28(3), 383–402.
- Hudson, V. M. (2005). Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations. *Journal of International Studies Association*, 1, 1–30.
- Hwang, W., Cho, W., & Wiegand, K. (2018). Do Korean-Japanese Historical Disputes Generate Rally Effects? *Journal of Asian Studies*, 77(3), 693–711.
<https://doi.org/10.1017/S0021911818000438>
- Jiyoon, K., Friedhoff, K., & Chungku, K. (2012). *The Asan Monthly Opinion Survey July 2012*. Retrieved from <https://kosda.snu.ac.kr/handle/20.500.12236/22467>
- Kan, K. (2012). Discovery of Disputes: Collective Memories on Textbooks and Japanese—South Korean Relations. *The Journal of Korean Studies*, 17(1), 97–124. R
- Kang, G. M. (2021). Resolving the Japan - Korea “Comfort Women” Conflict: The Most Effective vs. The Most Likely Solution. *The Journal of East Asian Affairs*, 34(2), 5–66. Retrieved from <https://www.inss.re.kr/upload/bbs/BSA05/202202/F20220222160908552.pdf>
- Kim, A. (2020). Understanding Japan–South Korea Cooperation and Friction Through Neoclassical Realist Theory. *Journal of International Relations*, 24(1), 28–52.
<https://doi.org/10.1177/0973598419888279>
- Kim, J.-Y. (2014). Escaping the Vicious Cycle: Symbolic Politics and History Disputes Between South Korea and Japan. *Asian Perspective*, 38(1), 31–60. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/42704853>
- Kim, J. (2020). The North Korea Problem : Perspectives on the Nuclear Debate , Economic Reforms and Beyond The North Korea Problem : Perspectives on the Nuclear Debate, Economic Reforms and Beyond. *Journal of Contemporary Asia*, 50(5), 848–859.
<https://doi.org/10.1080/00472336.2020.1793378>
- Klingner, B. (2012, September 24). Washington Should Urge Greater South Korean–Japanese Military and Diplomatic Cooperation. Retrieved December 25, 2020, from The Heritage Foundation website: <https://www.heritage.org/asia/report/washington-should-urge-greater-south-korean-japanese-military-and-diplomatic>

- Koga, K. (2014). Struggle for coalition-building: Japan, South Korea, and the Indo-Pacific. *Asian Politics and Policy*, 25(1), 51–84. <https://doi.org/10.1111/ASPP.12679>
- Koo, B. S., & Choi, J. Y. (2022). Who Takes the Japanese Threat Seriously? A Survey-Based Analysis of South Koreans' Perceptions. *Pacific Focus*, 37(2), 289–315. <https://doi.org/10.1111/PAFO.12214>
- Korostelina, K. V. (2017). The normative function of national historical narratives: South Korean perceptions of relations with Japan. *National Identities*, 21(2), 171–189. <https://doi.org/10.1080/14608944.2017.1401599>
- Ku, Y. (2019). Privatized foreign policy? Explaining the Park Geun-hye Administration's Decision-making Process. *Korea Journal*, 59(1), 106–134. <https://doi.org/10.25024/kj.2019.59.1.106>
- Kuki, S. (2013). The Burden of History: The Issue of “Comfort Women” and What Japan Must Do to Move Forward. *Journal of International Affairs*, 67(1), 245–256.
- Kumagai, N. (2016). The Background to the Japan-Republic of Korea Agreement: Compromises Concerning the Understanding of the Comfort Women Issue. *Asia-Pacific Review*, 23(1), 65–99. <https://doi.org/10.1080/13439006.2016.1195955>
- Lalitya, G. K. (2020). Analisis Sikap yang Diambil oleh Pemerintah Korea Selatan pada Masa Presiden Park Geun Hye Terkait dengan Isu Comfort. *Journal of International Relations*, 6(4), 639–648.
- Lee, J. (2014). THE STUBBORN SOUTH: Why Seoul Needs to Mend Ties with Japan. *World Affairs*, Vol. 177(No. 4), 80–86. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/43556674>
- Lee, J. W. (2014). Legacies of Japanese colonialism in the rhetorical constitution of South Korean national identity. [Http://Dx.Doi.Org/10.1080/14608944.2013.843516](http://Dx.Doi.Org/10.1080/14608944.2013.843516), 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/14608944.2013.843516>
- Lee, S. (2020). Foreign Policy Dilemma in South Korean Democracy : Challenge of Polarized and Politicized Public Opinion. *Peace Studies*, 28(2), 259–304. <https://doi.org/10.21051/ps.2020.10.28.2.259>
- Magbadelo, J. O. (2006). Japan And The Two Koreas The Challenges And Prospects Of Confidence-building. *World Affairs: The Journal of International Issues*, 10(2), 72–87. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/48577772?read-now=1&seq=8#page_scan_tab_content

- ts
- Mas'ood, M. (1989). *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Michishita, N. (2014). Changing Security Relationship between Japan and South Korea: Frictions and Hopes. *Http://Dx.Doi.Org/10.1080/13439006.2014.970327*, 21(2), 19–32. <https://doi.org/10.1080/13439006.2014.970327>
- Milani, C. R. S., & Pinheiro, L. (2016). The Politics of Brazilian Foreign Policy and Its Analytical Challenges. *Foreign Policy Analysis*, 13(April), 278–296. <https://doi.org/10.1093/fpa/orw027>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2016, March 21). Japan-U.S.-ROK Trilateral Summit Meeting. Retrieved June 12, 2022, from Countries & Regions website: https://www.mofa.go.jp/a_o/na/page4e_000420.html
- Ministry of National Defense Republic of Korea. (2016). 2016 Defense White Paper. In *Defense White Papers*. Retrieved from https://www.mnd.go.kr/user/mndEN/upload/pblict/PBLICTNEBOOK_201705180357180050.pdf
- Ministry of Public Administration and Security. (2013a). *New Year's Eve 2014*. Retrieved from https://www.pa.go.kr/research/content/s/speech/index.jsp?spMode=view&catid=c_pa02062&artid=1400106
- Ministry of Public Administration and Security. (2013b, February 24). 18th President Inauguration Ceremony. Retrieved June 15, 2022, from 행정안전부: 대통령기록관 website: <https://www.pa.go.kr/research/content/s/speech/index.jsp>
- Ministry of Public Administration and Security. (2015, September 30). 67th Armed Forces Day. Retrieved June 15, 2022, from 행정안전부: 대통령기록관 website: https://www.pa.go.kr/research/content/s/speech/index.jsp?spMode=view&catid=c_pa02062&artid=1400356
- Ministry of Public Administration and Security. (2016a). *2016 National Unification Convention*. Retrieved from https://www.pa.go.kr/research/content/s/speech/index.jsp?spMode=view&catid=c_pa02062&artid=1400469
- Ministry of Public Administration and Security. (2016b). *71st Liberation Day Celebration*. Retrieved from https://www.pa.go.kr/research/content/s/speech/index.jsp?spMode=view&catid=c_pa02062&artid=1400459
- Ministry of Public Administration and Security. (2016c). *97Th Anniversary 3.1 Commemoration Ceremony Speech*. Retrieved from https://www.pa.go.kr/research/content/s/speech/index.jsp?spMode=view&catid=c_pa02062&artid=1400405
- Ministry of Public Administration and Security. (2016d). *Parliamentary*

- Speech on State Affairs*. Retrieved from https://www.pa.go.kr/research/content/s/speech/index.jsp?spMode=view&catid=c_pa02062&artid=1400402
- Ministry of Public Administration and Security. (2016e, September 30). Congratulatory remarks for the 68th anniversary of the establishment of the Armed Forces and the celebration of the Armed Forces Day. Retrieved June 15, 2022, from 행정안전부: 대통령기록관 website: https://www.pa.go.kr/research/content/s/speech/index.jsp?spMode=view&catid=c_pa02062&artid=1400478
- Mobrand, E. (2018). Limited Pluralism in a Liberal Democracy: Party Law and Political Incorporation in South Korea Limited Pluralism in a Liberal Democracy: Party Law and Political Incorporation in South Korea. *Journal of Contemporary Asia*, 48(4), 605–621. <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1441428>
- Mulyaman, D. (2018). Lee Myung Bak's Decision on Sunshine Policy: South Korean National Interests or Personal Decision? *Jurnal Sospol*, 4(2), 169–186.
- Nakato, S. (2020). Security Cooperation Between Japan and South Korea on the North Korean Nuclear Threat: Strategic Priorities and Historical Issues. *Pacific Focus*, 35(2), 307–333. <https://doi.org/10.1111/pafo.12161>
- Nam, C. H. (2017). Can South Korea Embrace Japan's Expanding Security Role? Sources and the Manifestation of the Conflicting Identities. *Pacific Focus*, 32(3), 396–415. <https://doi.org/10.1111/pafo.12103>
- Oba, M., & Lee, J.-Y. (2020). Thaws and tremors. *A Triannual E-Journal of Bilateral Relations in the Indo-Pacific*, 21(3), 121–128. Retrieved from <http://cc.pacforum.org/2020/01/thaws-and-tremors/>
- Panda, R. (2015). Should South Korea go Nuclear? <Http://Dx.Doi.Org/10.1080/13439006.2015.1043708>, 22(1), 148–176. <https://doi.org/10.1080/13439006.2015.1043708>
- Park, S. H. (2017). Rhetorical Entrapment and The Politics of Alliance Cooperation: Explaining Divergent Outcomes in Japan and South Korea During the Iraq War. *International Relations*, 31(4), 484–510. <https://doi.org/10.1177/0047117817726362>
- Park, Y.-J. (2016). South Korea's Diplomacy and the Evolution of Korea-Japan Security Relations. *Seoul Journal of Japanese Studies*, Vol.2(No.1), 109–137. Retrieved from [https://s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/97040/1/06_PARK Young-June.pdf](https://s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/97040/1/06_PARK%20Young-June.pdf)
- Phillips, J., Lee, W., & Yi, J. (2020). Future of South Korea–Japan Relations: Decoupling or Liberal Discourse.

- Political Quarterly*, 91(2), 448–456.
<https://doi.org/10.1111/1467-923X.12786>
- Pieroni, E. (2022). Past-Oriented Foreign Policy: Japanese State-Identity and South Korea Discourse 2009-2012. *Central European Journal of International and Security Studies*, 16(2), 4–25.
<https://doi.org/10.51870/VEGR2906>
- Sakaki, A. (2012). Japanese-South Korean Textbook Talks: The Necessity of Political Leadership on JSTOR. *Pacific Affairs*, 85(2), 263–285.
- Santoro, D., & Warden, J. K. (2015). Assuring Japan and South Korea in the Second Nuclear Age. *Http://Dx.Doi.Org/10.1080/0163660X.2015.1038182*, 38(1), 147–165.
<https://doi.org/10.1080/0163660X.2015.1038182>
- Seo, J. (2021). Korea–Japan relations through thick description: revisiting the national identity formation process. *Third World Quarterly*, 1–16.
<https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1937098>
- Snyder, R. C., Bruck, H. W., & Sapin, B. (1962). *Foreign Policy Decisison-Making* (First Edit). New York: Free Press of Glencoe.
- Szalontai, B. (2018). North Korea between China, Japan and the ROK, 2012–2016. *Korea Journal*, 58(3), 156–183.
<https://doi.org/10.25024/kj.2018.58.3.156>
- Tamaki, T. (2020). It takes two to tango: The difficult Japan-South Korea relations as clash of realities. *Japanese Journal of Political Science*, 21(1), 1–18.
<https://doi.org/10.1017/S1468109919000161>
- Taylor, B. (2012). Japan and South Korea: The Limits of Alliance. *Survival*, 54(5), 93–100.
<https://doi.org/10.1080/00396338.2012.728346>
- Tow, W. T. (2015). The United States and Asia in 2014: Reconciling Rebalancing and Strategic Constraints. *Journal of Asian Survey*, 55(1), 12–20.
<https://doi.org/10.1525/AS.2015.55.1.12>
- Ward, T. J., & Lay, W. D. (2016). The Comfort Women Controversy: Not Over Yet. *East Asia*, 33(4), 255–269.
<https://doi.org/10.1007/s12140-016-9260-z>
- Wiegand, K. E. (2015). The South Korean–Japanese security relationship and the Dokdo/Takeshima islets dispute. *Http://Dx.Doi.Org/10.1080/09512748.2015.1011209*, 28(3), 347–366.
<https://doi.org/10.1080/09512748.2015.1011209>
- Yoon, T. R. (2008). Learning to Cooperate Not to Cooperate: Bargaining for The 1965 Korea-Japan Normalization. *Asian Perspective*, Vol. 32(No. 2), 59–91. Retrieved from
<https://www.jstor.org/stable/42704631>
- Zaidi, K. (2021). Decision-making in Russia's Foreign Policy Modelling Russia's Decision-Making with

reference to Ukraine and Moldova (2004-2018). *International Journal of Social Science Studies*, 9(6), 42. <https://doi.org/10.11114/ijsss.v9i6.5364>

Zhao, T. (2019, November 13). Why You Should Care Whether Japan and South

Korea Keep Sharing Intel - Carnegie Endowment for International Peace. Retrieved February 3, 2022, from Carnegie website: <https://carnegieendowment.org/2019/11/13/why-you-should-care-whether-japan-and-south-korea-keep-sharing-intel-pub-80345>